

# SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN



Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019



Jalan OPI Raya Jakabaring Kec. SU I Palembang– 30257  
Telepon/Fax : 0711-5740170  
E-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palembang, Pebruari 2020  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

**Pakerti Luhur,Ak.MM**  
**NIP 197504151995021001**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp120.750.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp120.750.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp242.033.663.983 atau mencapai 92,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp262.217.362.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada

31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.383.764.754 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp12.599.856.753; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.583.795.501 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp200.112.500.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp354.441.387 dan Rp27.383.764.754.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp243.475.852.053 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp243.475.852.053, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp120.750.000 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp243.475.852.053

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp15.597.360.901, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp243.475.852.053 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar - 113.195.890 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 255.021.010.409 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp27.029.323.367



## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	120.750.000	-	11.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>120.750.000</b>	-	<b>11.000.000</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	30.564.553.000	15.281.435.076	50,00	1.617.676.962
Belanja Barang	B.4	229.553.259.000	224.714.819.907	97,89	470.396.148.079
Belanja Modal	B.5	2.099.550.000	2.037.409.000	97,04	5.113.864.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>262.217.362.000</b>	<b>242.033.663.983</b>	<b>92,30</b>	<b>477.127.689.041</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(262.217.362.000)</b>	<b>(241.912.913.983)</b>		<b>(477.116.689.041)</b>

**II. NERACA**

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

<b>U R A I A N</b>	<b>Catatan</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	5.501.227.321	546.235.053
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	6.275.585.067	8.557.120.000
Persediaan		823.044.365	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>12.599.856.763</b>	<b>9.103.355.053</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.10	187.858.000	187.858.000
Peralatan dan Mesin	C.12	10.025.776.300	7.278.757.300
Gedung dan Bangunan	C.14	8.577.169.000	1.940.294.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	8.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(4.215.007.799)	(2.386.168.399)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>14.583.795.501</b>	<b>7.028.740.901</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.22	242.500.000	18.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.26	(42.387.500)	(6.500.000)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>200.112.500</b>	<b>11.500.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>27.383.764.754</b>	<b>16.143.595.954</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	354.441.387	171.349.171
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	-	374.885.882
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>354.441.387</b>	<b>546.235.053</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>354.441.387</b>	<b>546.235.053</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.31	27.029.323.367	15.597.360.901
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>27.029.323.367</b>	<b>15.597.360.901</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>27.383.764.754</b>	<b>16.143.595.954</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	7.330.690	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>7.330.690</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	15.291.597.076	1.553.715.512
Beban Persediaan	D.3	30.010.000	49.746.950
Beban Barang dan Jasa	D.4	150.392.800.304	276.143.209.618
Beban Pemeliharaan	D.5	1.497.538.851	1.475.635.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	74.640.455.502	183.198.350.973
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.751.531.010	874.197.623
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>243.603.932.743</b>	<b>463.294.855.676</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(243.596.602.053)</b>	<b>(463.294.855.676)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	11.000.000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	120.750.000	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>120.750.000</b>	<b>11.000.000</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(243.475.852.053)</b>	<b>(463.283.855.676)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.14		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(243.475.852.053)</b>	<b>(463.283.855.676)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>15.597.360.901</b>	<b>7.329.425.772</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(243.475.852.053)</b>	<b>(463.283.855.676)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	<b>(113.195.890)</b>	<b>(3.164.999.256)</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(113.195.890)	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	(3.164.999.256)
<b>Jumlah</b>		<b>(113.195.890)</b>	<b>(3.164.999.256)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	255.021.010.409	474.716.790.061
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		11.431.962.466	8.267.935.129
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>27.029.323.367</b>	<b>15.597.360.901</b>

### A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Dasar Hukum dan Profil  
Entitas

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
  3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
  4. penetapan calon gubernur;
  5. pelaksanaan kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
  - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

## 2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi;
- b) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- c) Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga..

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3 BASIS AKUNTANSI**

Menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar****a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2019	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	30.564.553.000	30.564.553.000
Belanja Barang	226.995.164.000	229.553.259.000
Belanja Modal	1.908.050.000	2.099.550.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>259.467.767.000</b>	<b>262.217.362.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp120.750.000

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp120.750.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp120.750.000 dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	120.750.000	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>120.750.000</b>	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 997,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.750.000	11.000.000	997,73
<b>Jumlah</b>	<b>120.750.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>997,73</b>

Penjelasan atas pendapatan NPBP sebesar Rp. 120.750.000 diatas merupakan ; pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir sebesar Rp. 90.000.000,-  
Bawaslu dari hasil temuan BPK tahun 2018 Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 30.750.000,-.

### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing- masing sebesar Rp120.750.000 dan Rp11.000.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 997,73 dari TA 2018 Tidak ada target penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2019. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	120.750.000	11.000.000	997,73
<b>Jumlah</b>	<b>120.750.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>997,73</b>

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan PNBPN Lainnya Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	120.750.000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	11.000.000	(100,00)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>120.750.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>997,73</b>

## B.2 Belanja

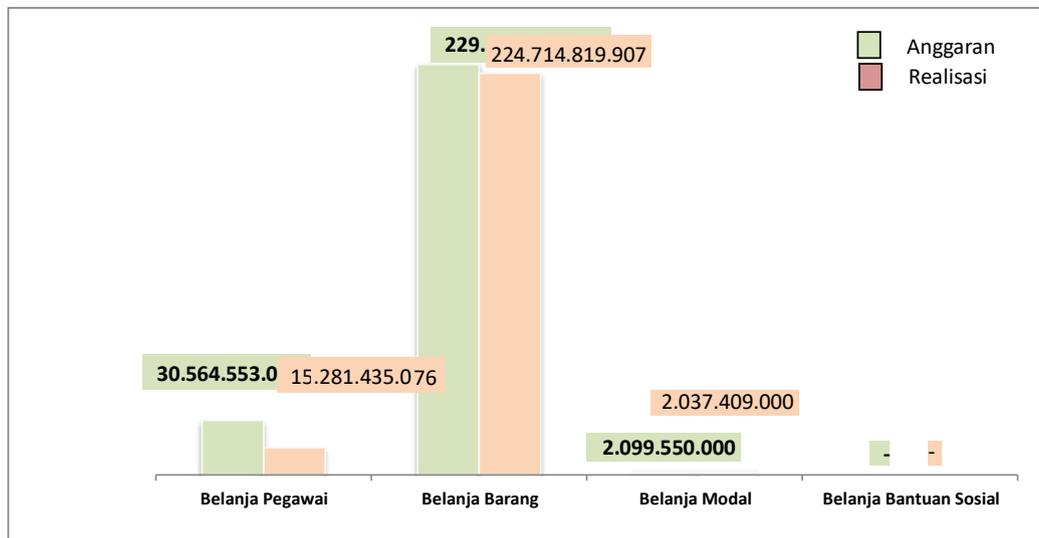
Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp242.033.663.983 atau 92,30 % dari anggaran belanja sebesar Rp.262.217.362.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan ( ) TA 2019

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	30.564.553.000	15.281.435.076	50,00
Belanja Barang	229.553.259.000	224.714.819.907	97,89
Belanja Modal	2.099.550.000	2.037.409.000	97,04
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>262.217.362.000</b>	<b>242.033.663.983</b>	<b>92,30</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2019



Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 49,27% terjadi karena pada tahun 2018 terdapat Pilkada pada Provinsi Sumatera Selatan dan. Berikut rincian realisasi belanja TA 2019 dan TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Pegawai	15.281.435.076	1.617.676.962	844,65
Belanja Barang	224.714.819.907	470.396.148.079	(52,23)
Belanja Modal	2.037.409.000	5.113.864.000	(60,16)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>242.033.663.983</b>	<b>477.127.689.041</b>	<b>(49,27)</b>

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15.281.435.076 dan Rp1.617.676.962. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 844,65 % dari TA 2018. Hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji PNS dan penambahan pegawai PNS dan Uang Kehormatan pada Bawaslu Provinsi dan juga Pembayaran Uang Kehormatan Pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang dari Belanja Barang (52) menjadi Belanja Pegawai (51) dan terdapatnya kenaikan Tunjangan Kinerja.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Gaji Pokok PNS	326.253.740	98.792.400	230,24
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.586	1.656	297,71
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8.113.360	6.331.640	28,14
Belanja Tunj. Anak PNS	2.787.664	2.532.656	10,07
Belanja Tunj. Struktural PNS	48.700.000	33.300.000	46,25
Belanja Tunj. PPh PNS	118.482.078	38.724.250	205,96
Belanja Tunj. Beras PNS	13.252.860	7.821.360	69,44
Belanja Uang Makan PNS	123.436.000	68.864.000	79,25
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PN	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	23.725.000	7.630.000	210,94
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	12.411.838.400	816.466.000	1.420,19
Belanja Uang Lembur	326.484.500	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan)r	1.878.355.400	473.251.550	296,90
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>15.281.435.588</b>	<b>1.617.676.962</b>	<b>844,65</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	512	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.281.435.076</b>	<b>1.617.676.962</b>	<b>844,65</b>

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp224.714.819.907 dan Rp470.396.148.079. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar 52,23% dari Realisasi TA 2018.

Hal ini antara lain disebabkan adanya penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2018 terdapat juga Dana Hibah Pilkada.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Barang Operasional	68.542.064.032	137.540.377.390	(50,17)
Belanja Barang Non Operasional	36.142.249.206	66.088.983.801	(45,31)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.010.000	60.019.950	(50,00)
Belanja Jasa	43.882.364.210	82.381.364.365	(46,73)
Belanja Pemeliharaan	1.497.538.851	1.492.537.000	0,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	74.620.599.602	183.260.300.973	(59,28)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>224.714.825.901</b>	<b>470.823.583.479</b>	<b>(52,27)</b>
Pengembalian Belanja	5.994	427.435.400	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>224.714.819.907</b>	<b>470.396.148.079</b>	<b>(52,23)</b>

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.037.409.000 dan Rp5.113.864.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar 60,16% dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh alokasi anggaran untuk Belanja modal tidak sebesar tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.812.909.000	5.113.864.000	(64,55)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	224.500.000	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.037.409.000</b>	<b>5.113.864.000</b>	<b>(60,16)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.037.409.000</b>	<b>5.113.864.000</b>	<b>(60,16)</b>

#### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2019 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal tanah selama periode Semester I Tahun 2019 dibandingkan periode sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.812.909.000 dan Rp5.113.864.000, mengalami penurunan sebesar 64,55% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran untuk Belanja modal tidak sebesar tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.812.909.000	5.113.864.000	(64,55)
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.812.909.000</b>	<b>5.113.864.000</b>	<b>(64,55)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.812.909.000</b>	<b>5.113.864.000</b>	<b>(64,55)</b>

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2018. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama periode Semester I Tahun 2019 dibandingkan periode sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode Semester I Tahun 2019 dibandingkan periode sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp224.500.000 dan Rp0, Belanja modal Lainnya dipergunakan untuk pengadaan website Bawaslu kabupaten/kota dan Pengembangan Website Bawaslu provinsi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Lainnya	224.500.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>224.500.000</b>	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>224.500.000</b>	-	-

### B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2019 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2018. Belanja Bantuan Sosial Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja Sosial selama periode Semester I Tahun 2019 dibandingkan periode sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Tidak ada Kejadian –kejadian penting setelah Laporan Realisasi anggaran Akhir Desember 2019.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

Keterangan	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Uang Tunai	-	-
Kuitansi UP	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5.501.227.321 dan Rp546.235.053. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

Keterangan	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Honor pokja Sentra gakkumdu	6.240.000	
Jas Giro	7.375.895	-
Hibah Pilkada	5.487.611.426	
<b>Jumlah</b>	<b>5.501.227.321</b>	<b>-</b>

Penjelasan Lebih Lanjut Kas lainnya dan Setara Kas Lainnya sebagai berikut :

Kas Lainnya di Bendahara pengeluaran sebesar RP. 13.615.895, terdiri dari

- Pengembalian honor Pokja Sentra Gakkumdu sebesarRp. 6.240.000 sesuai dengan bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTB 20013182446 tanggal 31 Januari 2020
- Jasa Giro Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 6.849,- telah disetor ke kas daerah tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor rekening 200 300 0001
- Jasa Giro Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp. 38.356,- kan disetor ke kas daerah
- Jasa Giro Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp. 38.356,- akan disetor ke Kas Negara
- Jasa Giro kabupaten OKU sebesar Rp. 194.521,- akan disetor ke Kas Negara
- Jasa Giro Kabupaten OKUS sebesar Rp. 7.037.539,- akan disetor ke Kas Negara
- Jasa Giro Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir sebesar Rp. 60.274 akan disetor ke Kas Negara

Kas Lainnya dari Hibah Pilkada sebesar Rp. 5.487.611.426,- terdiri dari :

- Kas Hibah pada Kabupaten Penugkal Abab Lematang Ilir sebesar Rp. 650.000.000,-
- Kas Hibah pada Kabupaten Ogan lir sebesar Rp. 2.100.000,-
- Kas Hibah pada Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp. 4..835.511.426

Belanja Dibayar Dimuka  
(prepaid)  
Rp6.275.585.067

### C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp6.275.585.067 dan Rp8.557.120.000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

Keterangan	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	6.275.585.067,00	8.557.120.000,00
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.275.585.067</b>	<b>8.557.120.000</b>

Penjelasan Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut :

Saldo 1 Januari 2019 sebesar Rp. 8.557.120.000

Pengurangan Pemakaian atas sewa kendaraan dengan perjanjian Sewa Nomor 083/SPP/SS/SET/PL.03.03/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 sebesar (Rp.5.765.760.000) sebanyak 84 unit

Penambahan atas Sewa Kendaraan sesuai dengan perjanjian sewa Nomor 127/SPK/SS/SET/PL.03.03/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar **Rp.2.782.058.400** yaitu Sewa Mobil untuk Tahun 2020 sebanyak 34 unit untuk 4 bulan (september sd Desember 2020) dengan harga satuan 5.724.400/bulan/unit dan Sewa Kendaraan Roda 4 sebanyak 50 unit dalam waktu 7 bulan mulai bulan juni sd desember 2020 dengan harga Rp.5.724.400/bulan/unit

Sewa Gedung Kantor untuk Tahun 2020 (12 bulan) pada Bawaslu Kota Palembang Rp.120.000.000,-

Sewa Gedung kantor untuk Tahun 2020 pada Bawaslu Kota Prabumulih Rp. 88.000.000,-

Sewa Gedung kantor untuk Tahun 2020 pada Bawaslu Kota Pagar Alam Rp. 88.000.000,-

Sewa Gedung kantor untuk Tahun 2020 Bawaslu Kab. Musi Banyuasin Rp.110.000.000,-

Sewa Gedung kantor untuk Tahun 2020 pada Bawaslu Kab. Muratara Rp. 91.666.667,-

Sewa Gedung kantor untuk Tahun 2020 pada Bawaslu Kab. PALI Rp.110.000.000,-

Sewa Gedung kantor untuk Tahun 2020 pada Bawaslu Kab. OKU Timur Rp.104.500.000,-

#### C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan ( ) TA 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

#### C.6 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp823.044.365 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

Jenis	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018
Barang Konsumsi	<b>823.044.365</b>	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>823.044.365</b>	<b>-</b>

Persediaan tersebut di atas merupakan sisa buku saksi parpol yang terdapat pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Persediaan yang Belum  
Diregister Rp0

### C.7 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi Rp0

### C.8 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

Debitur	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2019 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

### C.10 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp187.858.000 dan Rp187.858.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019</b>	<b>187.858.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	-
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>187.858.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan ( ) TA 2019

No.	Luas	Lokasi	Nilai
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-

Tanah Belum Diregister  
Rp0

### C.11 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin  
Rp10.025.776.300

### C.12 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp10.025.776.300 dan Rp7.278.757.300. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019</b>	<b>7.278.757.300</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	1.763.409.000
Hibah (Masuk)	983.610.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>10.025.776.300</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(3.893.617.242)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>6.132.159.058</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berasal dari Pembelian berupa:

No	Realisasi Belanja Modal	Intrakomptabel		
		Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	532111	Transportabel Generating Set	17	237.620.000
2	532111	Lemari Besi/Metal	44	107.740.000
3	532111	Filling Cabinet Besi	34	54.895.000
4	532111	CCTV	17	84.550.000
5	532111	Alat Penghancur Kertas	5	12.500.000
6	532111	LCD Proyektor/infocus	17	84.489.000
7	532111	Meja Rapat	17	101.540.000
8	532111	Mesin Penghisap Debu	1	2.500.000
9	532111	AC Split	44	239.810.000
10	532111	Sound System	34	168.400.000
11	532111	Lap top	61	487.875.000
12	532111	Printer	34	91.490.000
13	532111	Scanner	12	90.000.000
Jumlah			337	1.763.409.000

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berasal dari Hibah berupa Alat Angkutan Darat Bermotor ( 3.02.01 ) sebesar Rp 983.610.000, terdiri :

- Berdasarkan BAST 0562.2/BAST/SET/SS/PL.03.00/VIII/2018 dari pemda Sumsel berupa Kendaraan Roda 4 Toyota All New Fortuner sebanyak 1 Unit seharga Rp.453.320.000 dan Kendaraan Roda 2 Hnda Vario sebanyak 10 Unit seharga Rp.20.226.000,-
- Berdasarkan perjanjian dengan Nomor B1130-KC-IV/DJS/02/2019 Tanggal 20 Februari 2019 dengan Bank BRI berupa 1 unit Mobil Xenia seharga Rp. 162.700.000 dan 11 Unit kendaraan Roda 2 seharga Rp. 165.330.000,-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi Kurang Peralatan dan Mesin selama periode Tahun 2019

*Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

Peralatan dan Mesin  
Belum Diregister Rp0

### C.13 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan  
Rp8.577.169.000

### C.14 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.577.169.000 dan Rp1.940.294.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019</b>	<b>1.940.294.000</b>
<b>Mutasi tambah</b>	
Hibah (Masuk)	6.636.875.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>8.577.169.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(315.523.890)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>8.261.645.110</b>

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Ada mutasi tambah Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 sebesar Rp6.636.875.000 merupakan hibah TAYL Tahun 2018 yang baru dicatat didalam Neraca Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan BAST Nomor 056.1/BAST/SET/SS/PL.03.02/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 untuk Pembangunan tambahan Gedung dan Bangunan kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada mutasi kurang Gedung dan Bangunan selama periode tahun 2019

*Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

Gedung dan Bangunan  
Belum Diregister Rp0

### C.15 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp8.000.000

### C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.8.000.000 dan Rp.8.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	-
	-
<b>Mutasi Kurang</b>	-
	-
<b>Saldo per</b>	<b>8.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.	(5.866.667)
<b>Nilai Buku per</b>	<b>2.133.333</b>

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode semester I tahun 2019

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode semester I tahun 2019

*Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Belum  
Diregister Rp0

### C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Tidak ada mutasi tambah Aset Tetap Lainnya selama periode Semester I tahun 2019.. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghapusan	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama periode Semester I tahun 2019.

*Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

### C.19 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.0 dan Rp.0

### C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

### C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp4.215.007.799 dan Rp2.386.168.399. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan ( ) Tahun 2019*

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.025.776.300	(3.893.617.242)	6.132.159.058
2	Gedung dan Bangunan	8.577.169.000	(315.523.890)	8.261.645.110
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.000.000	(5.866.667)	2.133.333
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>18.610.945.300</b>	<b>(4.215.007.799)</b>	<b>14.395.937.501</b>

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.*

### C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp242.500.000 dan Rp18.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2019</b>	<b>18.000.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	195.500.000
Pengembangan	29.000.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2019</b>	<b>242.500.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(42.387.500)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>200.112.500</b>

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Terdapat pengadaan software pada 17 Bawaslu Kabupaten/kota sebesar Rp..195.500.000 dengan nilai masing-masing per kabupaten seharga Rp.11.500.000,-
- Terdapat pengadaan software pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp..29.000.000.

### C.23 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per</b>	-

**C.24 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- -

Mutasi Kurang

- -

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

**C.25 Aset Lainnya yang Belum Diregister**

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 42.387.500

**C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp42.387.500 dan Rp6.500.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	242.500.000	(42.387.500)	200.112.500
Aset Lain-lain	-	-	-
	-	-	-
<b>Total</b>	<b>242.500.000</b>	<b>(42.387.500)</b>	<b>200.112.500</b>

### C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp354.441.387 dan Rp171.349.171. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	354.441.387	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>354.441.387</b>	<b>-</b>

Penjelasan lebih lanjut untuk hutang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut :

- Biaya Advokasi sesuai dengan Perjanjian Kontrak dengan Kantor Advokasi HERI MUKTI.H.,SH & Partners sebesar Rp. 300.000.000,-
- Biaya hutang perjalanan dinas yang belum dibayarkan sentra Gakkumdu sebesar Rp. 19.855.900,-
- Biaya Saksi sebesar Rp. 5.400.000,- ( jurnal beban jasa profesi 522151 pada belanja barang yang masih harus dibayar 212112
- Biaya tagihan pemakaian listrik bulan Desember 2019 sebesar Rp. 13.865.169,-
- Biaya tagihan pemakaian listrik kantor Sentra gakkumdu di Km.6 bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.790.682,-
- Biaya tagihan pekaian PDAM Kantor Sentra Gakkumdu di Km.6 bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.131.136,-
- Biaya tagihan pemakaian PDAM bulan Desember 2019 sebesar Rp.1.236.500,-
- Hutang Uang makan PNS Desember Rp. 10.162.000,-

### C.28 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Hibah Yang Belum Disahkan*

Uraian	Jumlah
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Uang Muka dari KPPN  
Rp0

### C.29 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :*

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp0

### C.30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp374.885.882. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

*Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018
Hutang pajak Bendahara yang belum disetor	-	Rp374.885.882
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>Rp374.885.882</b>

Ekuitas Rp27.029.323.367

### C.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.029.323.367. dan Rp15.597.360.901. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### C. 32 Catatan Penting Lainnya neraca

Tidak ada Kejadian –kejadian penting setelah tanggal Neraca Akhir Desember 2019.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp7.330.690

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp7.330.690 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	7.330.690	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.330.690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Pegawai  
Rp15.291.597.076

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15.291.597.076 dan Rp1.553.715.512.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar 884,20 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan adanya kenaikan gaji PNS dan penambahan pegawai PNS dan Uang Kehormatan pada Bawaslu Provinsi dan juga Pembayaran Uang Kehormatan Pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang dari Belanja Barang (52) menjadi Belanja Pegawai (51) dan terdapatnya kenaikan Tunjangan Kinerja. Rincian Beban Pegawai Tahunan ( ) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Gaji Pokok PNS	326.253.740	98.792.400	230,24
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.074	1.656	266,79
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	8.113.360	6.331.640	28,14
Beban Tunj. Anak PNS	2.787.664	2.532.656	10,07
Beban Tunj. Struktural PNS	48.700.000	33.300.000	46,25
Beban Tunj. PPh PNS	118.482.078	38.724.250	205,96
Beban Tunj. Beras PNS	13.252.860	7.821.360	69,44
Beban Uang Makan PNS	133.598.000	68.864.000	94,00
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	23.725.000	7.630.000	210,94
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	12.411.838.400	816.466.000	1.420,19
Beban Uang Lembur	326.484.500	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.878.355.400	473.251.550	296,90
<b>Jumlah</b>	<b>15.291.597.076</b>	<b>1.553.715.512</b>	<b>884,20</b>

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.010.000 dan Rp49.746.950

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 39,67 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Persediaan konsumsi	30.010.000	49.746.950	(39,67)
	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>30.010.000,00</b>	<b>49.746.950</b>	<b>(39,67)</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp150.392.800.304 dan Rp276.143.209.618.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 45,24 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Pada Semester I Tahun 2019, terjadi penurunan pagu atas belanja barang dan jasa.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Keperluan Perkantoran	65.468.068.596	134.280.643.284	(51,25)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	5.500.000	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.216.304.000	2.213.279.506	(45,05)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.857.685.442	303.942.200	511,20
Beban Bahan	30.829.124.641	53.354.523.801	(42,22)
Beban Honor Output Kegiatan	2.569.080.000	12.366.800.000	(79,23)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.914.760.200	275.605.000	594,75
Beban Langganan Listrik	1.237.855.787	1.286.891.353	(3,81)
Beban Langganan Telepon	82.839.247	100.609.038	(17,66)
Beban Langganan Air	472.473.058	542.237.272	(12,87)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	162.214.687	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	300.000.000	7.430.000.000	(95,96)
Beban Sewa	34.054.148.333	44.721.212.227	(23,85)
Beban Jasa Profesi	8.844.561.000	17.084.617.000	(48,23)
Beban Jasa Lainnya	1.491.000.000	1.641.814.250	(9,18)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	49.500.000	373.320.000	(86,74)
<b>Jumlah</b>	<b>150.392.800.304</b>	<b>276.143.209.618</b>	<b>(45,54)</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.497.538.851 dan Rp1.475.635.000.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,48 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan adanya pemeliharaan gedung. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	676.563.000	144.954.000	366,74
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	820.975.851	1.152.928.000	(28,79)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	152.480.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	15.000.000	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	10.273.000	(100,00)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.497.538.851</b>	<b>1.475.635.000</b>	<b>1,48</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp74.640.455.502 dan Rp183.198.350.973

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 59,25 persen disebabkan oleh berkurangnya intensitas perjalanan dinas di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Perjalanan Biasa	10.311.344.977	39.130.820.755	(73,65)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.295.248.306	52.112.227.718	(59,14)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.033.862.219	91.955.302.500	(53,20)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>74.640.455.502,00</b>	<b>183.198.350.973</b>	<b>(59,26)</b>

#### D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.751.531.010 dan Rp874.197.623.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.543.566.796	830.658.409	85,82
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.543.380	38.805.880	342,06
Beban Penyusutan Jaringan	533.334	533.334	-
Beban Amortisasi Software	35.687.500	4.000.000	792,19
Beban Amortisasi Lisensi	200.000	200.000	-
	-	-	-
<b>Jumah Penyusutan</b>	<b>1.751.531.010</b>	<b>874.197.623</b>	<b>100,36</b>
	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.751.531.010</b>	<b>874.197.623</b>	<b>100,36</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit)  
Penjualan Aset Non  
Lancar Rp0

#### D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp11.000.000

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	11.000.000,00	(100)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>11.000.000</b>	<b>(100)</b>

Surplus (Defisit)  
Penyelesaian Kewajiban  
Jangka Panjang Rp0

#### D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Rp120.750.000

#### D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp120.750.000 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan ( ) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	120.750.000	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>120.750.000,00</b>	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan ( ) 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

#### D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Tidak ada Kejadian –kejadian penting Lainnya Laporan Operasional setelah tanggal Akhir Desember 2019.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp.15.597.360.901,00*

### E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.15.597.360.901,00 dan Rp.7.329.425.772,00

*Defisit LO Rp.-  
243.475.852.053,00*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.243.475.852.053,00 dan Rp.463.283.855.676,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0.00*

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.113.195.890 dan Rp.3.164.999.256 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp.0,00*

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan  
Rp0,00*

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00*

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih Revaluasi Aset  
Rp.0,00*

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2019*

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp.113.195.890) dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari penyusutan Gedung dan bangunan yang di peroleh dari TAYL semester I pada Tahun 2018 yang dilakukan pada Tahun 2019 berdasarkan atas BAST Nomor 056.1/BAST/SET/SS/PL.03.02/VIII/2018 Tanggal 31 agustus 2018.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(113.195.890)
	-
<b>Jumlah</b>	<b>(113.195.890,0)</b>

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-3.164.999.256. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2019

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.255.021.010.409 dan Rp.474.716.790.061. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2019

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	239.221.275.409
Diterima dari Entitas Lain	(120.750.000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	8.628.030.000
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	7.292.455.000
	-
<b>Jumlah</b>	<b>255.021.010.409</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DKEL sebesar Rp 239.221.275.409, sedangkan DDEL sebesar Rp 120.750.000

#### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 terdiri dari :

#### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2019

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Kabupaten Ogan Ilir	Uang	350.000.000
Kabupaten Musi Rawas	Uang	250.000.000
Kabupaten Musi Rawas Utara	Uang	200.000.000
Kabupaten OKU	Uang	500.000.000
Kabupaten OKUS	Uang	6.000.000.000
Kabupaten PALI	Uang	1.000.000.000
Hibah Barang BRI	Barang	328.030.000
<b>Total Pengesahan</b>		<b>8.628.030.000</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8.628.030.000</b>

Rincian Pengesahan Hibah TAYL untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemda Sumsel	Barang	655.580.000
Pemda Sumsel	Barang	6.636.875.000
<b>Total Pengesahan</b>		<b>7.292.455.000</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran

#### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.26.198.948.312, 00 dan Rp.15.597.360.901,00.

Ekuitas Akhir  
Rp26.198.948.312

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian –kejadian penting setelah tanggal Neraca Akhir Desember 2019.

### PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2 Terdapat pergantian Pejabat pada Bawaslu, yaitu Bendahara Pengeluaran Nama Dra. Isnayeni, M.Si menjabat dari bulan Januari s.d September 2019 dilanjutkan dengan Isnaini pada bulan Oktober 2019 berdasarkan SK Kepala Sekretariat dengan Nomor 121/SK/SS/SET/KP.00/X/2019, sedangkan pada bulan November s.d Desember 2019 yaitu menjadi Indri heryanti, S.H berdasarkan SK Kepala Sekretariat dengan Nomor 161/SK/SS/KP.00/XI/2019 pada tanggal 12 Nopember 2019.

Terdapat Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 0648/K.BAWASLU/KU.01.00/X/2019 Dari Ir.H. Iriadi, MS menjadi Pakerti Luhur, AK., MM.

Terdapat pengajuan TAYL pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu Renovasi Gedung Rapat, rumah Jaga, Musholla dan parker Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan BAST dengan Nomor 056.1/BAST/SET/SS/PL03.02/VIII/2018 Senilai Rp. 6.636.875.000, dengan Nomor Register 2DYXYLCA dan telah di sahkan ke KPPN dengan nomor MPHL BJS 2019014686250001

Terdapat juga pengajuan TAYL berupa Kendaraan atas dasar 056.2/BAST/SET/ SS/PL.03.02/VIII/2018 SENILAI Rp. 655.580.000, dengan nomor register 2H1451MA dan pengesahan dari KPPN dengan Nomor MHLBJS 2019014686250002

Terdapat Pengesahan Hibah Barang yang diperoleh dari Bank BRI atas dasar perjanjian dengan Nomor B1130-KC-IV/DJ/02/2019 Sebesar Rp. 328.030.000 berupa 1 unit Mobil dan 11 Unit Motor, dengan Nomor Register 2STC3EZA dan pengesahan MHLBJS dengan Nomor 2019014686250003

Terdapat Hibah Pilkada pada 6 Kabupaten yang telah di sahkan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten OKUS menerima Pendapatan dari Pemda Sebesar Rp.6.000.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp1.164.488.574 Nomor SPHL 190140000000082 , Register 2WXS7V5A
2. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerima Pendapatan dari Pemda Sebesar Rp.350.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp347.900.000 Nomor SPHL 190140000000080 , Register 24RLXYMA
3. Bawaslu Kabupaten Muratara menerima Pendapatan dari Pemda Sebesar Rp.200.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp200.000.000 Nomor SPHL 190140501130001, Register 22HRBFFA
4. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menerima Pendapatan dari Pemda Sebesar Rp.250.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp250.000.000 Nomor SPHL 190140501180001 , Register 224WQ4AA
5. Bawaslu Kabupaten OKU menerima Pendapatan dari Pemda Sebesar Rp.500.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp500.000.000 Nomor SPHL 190140501140001 , Register 9SV9Q9A
6. Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir menerima Pendapatan dari Pemda Sebesar Rp.1.000.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp350.000.000 Nomor SPHL 190140000000081 , Register 2H9AVGYA

Pejabat Pengelola Keuangan : Pakerti Luhur, Ak., MM  
Kuasa Pengguna Anggaran : Pakerti Luhur, Ak., MM  
Pejabat Pembuat Komitmen : Syafizal, ST  
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Syafizal, ST  
Bendahara Pengeluaran : Indri Heryanti, S.H

Palembang, 31 Desember 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran

**Pakerti Luhur, AK, MM**  
NIP. 197504151995021001



## **BERITA ACARA REKONSILIASI**

Nomor: BAR-180084/WPB.06/KP.014/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN (686250) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	262,217,362,000	262,217,362,000	0
2	Belanja	242,033,670,489	242,033,670,489	0
3	Pengembalian Belanja	-6,506	-6,506	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	120,750,000	120,750,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	5,487,611,426	5,487,611,426	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	7,620,485,000	7,620,485,000	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Afyaini  
NIP.196308041985032002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
KPA

Pakerti Luhur, Ak., MM.  
NIP.197504151995021001

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN (686250)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pagu Anggaran

SiAP : 262,217,362,000

SAI/SA-BUN : 262,217,362,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 242,033,670,489

SAI/SA-BUN : 242,033,670,489

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 4. Pengembalian Belanja

SiAP : -6,506

SAI/SA-BUN : -6,506

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 120,750,000

SAI/SA-BUN : 120,750,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 5,487,611,426

SAI/SA-BUN : 5,487,611,426

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 7,620,485,000

SAI/SA-BUN : 7,620,485,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Afyaini  
NIP.196308041985032002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
KPA

Pakerti Luhur, Ak., MM.  
NIP.197504151995021001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah